

**PENGARUH BELANJA SUBSIDI, BELANJA HIBAH DAN BELANJA
BANTUAN SOSIAL TERHADAP KEMISKINAN DI INDONESIA**



Skripsi Oleh :

DINAR ISLAMI SARI

01021281924034

EKONOMI PEMBANGUNAN

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Meraih Gelar Sarjana Ekonomi

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS EKONOMI

2023

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS SRIWIJAYA**

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF

**PENGARUH BELANJA SUBSIDI, BELANJA HIBAH DAN BELANJA
BANTUAN SOSIAL TERHADAP KEMISKINAN DI INDONESIA**

Disusun Oleh:

Nama : Dinar Islami Sari
NIM : 01021281924034
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Ekonomi Pembangunan
Bidang Kajian/Konsentrasi : Keuangan Daerah

Disetujui untuk digunakan dalam ujian komprehensif.

TANGGAL PERSETUJUAN

DOSEN PEMBIMBING



Tanggal :27 Juni 2023

Feny Marissa, S.E., M.Si
NIP.199004072018032001

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

PENGARUH BELANJA SUBSIDI, BELANJA HIBAH DAN BELANJA BANTUAN SOSIAL TERHADAP KEMISKINAN DI INDONESIA

Disusun oleh :

Nama : Dinar Islami Sari
NIM : 01021281924034
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Ekonomi Pembangunan
Bidang Kajian/Konsentrasi : Keuangan Daerah

Telah diuji dalam ujian komprehensif pada tanggal 27 Juli 2023 dan telah memenuhi syarat untuk diterima.

Panitia Ujian Komprehensif
Inderalaya, 14 Agustus 2023

Ketua



Feny Marissa, S.E., M.Si
NIP.199004072018032001

Anggota



Dr. H. Azwardi, S.E., M.Si
NIP. 196805181993031003

Mengetahui,
Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan

ASLI

JUR. EK. PEMBANGUNAN

29.8.2023

FAKULTAS EKONOMI UNSRI



Dr. Mukhlis, S.E., M.Si
NIP. 197304062010121001

SURAT PERNYATAAN INTEGRASI KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dinar Islami Sari
NIM : 01021281924034
Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Ekonomi Pembangunan
Bidang Kajian/Konsentrasi : Keuangan Daerah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

Skripsi yang berjudul : “Pengaruh Belanja Subsidi, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial terhadap Kemiskinan di Indonesia”

Pembimbing : Feny Marissa, S.E., M.Si

Tanggal Ujian : 27 Juli 2023

Adalah benar hasil karya saya sendiri. Dalam skripsi ini tidak ada kutipan hasil karya orang lain yang tidak disebutkan sumbernya. Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, dan apabila pernyataan saya ini tidak benar dikemudian hari, saya bersedia dicabut predikat kelulusan dan gelar kesarjanaaan.

Inderalaya, 17 Agustus 2023
Pembuat Pernyataan

ASLI
JUR. EK. PEMBANGUNAN 29-8-2023
FAKULTAS EKONOMI UNSRI



Dinar Islami Sari
01021281924034

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas Rahmat dan ridho-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan baik. Skripsi ini dibuat penulis dengan judul “Pengaruh Belanja Subsidi, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial terhadap Kemiskinan di Indonesia”. Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk kelulusan meraih derajat Sarjana Ekonomi program Strata Satu (S1) Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.

Dalam penyusunan skripsi ini , penulis banyak mendapatkan bantuan, dukungan, bimbingan dari berbagai pihak, sehingga penulis dapat menyelesaikan pengerjaan skripsi ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan mohon maaf jika skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dan sifat positif guna menyempurnakan skripsi ini untuk kemajuan di masa yang akan datang. Penulis berharap penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan bermanfaat bagi para pembaca.

Inderalaya, 1 Agustus 2023



Dinar Islami Sari

NIM. 01021381924034

UCAPAN TERIMAKASIH

Segala puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala Rahmat dan karunia-Nya yang senantiasa peneliti rasakan, sehingga pada akhirnya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Pengaruh Belanja Subsidi, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial terhadap Kemiskinan di Indonesia”. Peneliti sangat menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini, tentu peneliti tidak terlepas dari bimbingan berbagai pihak yang telah mendukung baik secara moril maupun materil. Untuk itu, peneliti ingin mempersembahkan sekaligus mengucapkan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada:

1. Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dan memperoleh gelar pendidikan Strata Satu (S1).
2. Terima kasih yang paling istimewa dan tidak akan terbalaskan diberikan kepada Keluarga Besar peneliti, kedua orang tuaku Ayahanda Rusdi, Ibunda Samsinar, kedua kakak laki – lakiku Ilham Rezky dan Yandra Pratama, serta adikku satu – satunya Muhammad Aji Pamungkas, yang tidak henti – hentinya memberikan dukungan, nasihat dan didikannya selama ini.
3. Bapak Mukhlis, S.E., M.Si selaku Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Dr. Sukanto, S.E., M.Si selaku Sekretaris Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
5. Ibu Feny Marissa, S.E., M.Si selaku dosen pembimbing yang telah mengorbankan waktu, tenaga dan ilmu – ilmunya untuk dapat membimbing, mengarahkan dan memberikan saran dalam penyelesaian skripsi ini.

6. Bapak Dr. H. Azwardi, S.E., M.Si selaku dosen penguji yang telah memberikan kritik dan saran dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Prof. Dr. Bernadette Robiani, M.Sc selaku dosen pembimbing akademik saya yang telah memberikan waktu serta sarannya selama perkuliahan 8 semester ini.

Inderalaya, 1 Agustus 2023



Dinar Islami Sari

NIM.01021281924034

ABSTRAK

PENGARUH BELANJA SUBSIDI, BELANJA HIBAH DAN BELANJA BANTUAN SOSIAL TERHADAP KEMISKINAN DI INDONESIA

Oleh :

Dinar Islami Sari; Feny Marissa S.E., M.Si

Kemiskinan merupakan masalah *multi dimensional* yang rumit di negara berkembang termasuk Indonesia. Belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial merupakan pengeluaran pemerintah yang diperuntukkan untuk membantu mengurangi kemiskinan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh dari belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial terhadap kemiskinan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kuantitatif dengan teknik analisis regresi linier berganda. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang bersumber dari beberapa instansi seperti Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPk) dan Badan Pusat Statistik (BPS) Periode 2003 – 2022. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan belanja subsidi (energi dan non-energi), belanja hibah, dan belanja bantuan sosial memiliki pengaruh terhadap kemiskinan di Indonesia, sedangkan secara parsial belanja subsidi energi dan belanja hibah memiliki pengaruh terhadap kemiskinan di Indonesia. Namun belanja subsidi non-energi dan belanja bantuan sosial tidak memiliki pengaruh terhadap kemiskinan di Indonesia. Hal ini dapat terjadi karena realisasi anggaran belanja hibah dan belanja subsidi energi diprioritaskan dalam kebijakan publik untuk mengurangi kemiskinan, sedangkan belanja subsidi non-energi dan belanja bantuan sosial terjadi karena ketidaktepatan sasaran dalam pendistribusiannya.

Kata Kunci : *Belanja Subsidi Energi, Belanja Subsidi Non-Energi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Jumlah Penduduk Miskin*

Mengetahui,
Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan



Dr. Mukhlis, S.E., M.Si
NIP. 197304062010121001

Ketua



Feny Marissa, S.E., M.Si
NIP.199004072018032001

ABSTRACT

THE EFFECT OF SUBSIDY EXPENDITURE, GRANT EXPENDITURE, AND SOCIAL ASSISTANCE EXPENDITURE ON POVERTY IN INDONESIA

By :

Dinar Islami Sari; Feny Marissa S.E., M.Si

Poverty is a complex, multi-dimensional problem in developing countries including Indonesia. Subsidy expenditure, grant expenditure and social assistance expenditure are government expenditures intended to help reduce poverty. This study aims to examine the effect of subsidy expenditure, grant expenditure and social assistance expenditure on poverty in Indonesia. This study uses a quantitative descriptive analysis method with multiple linear regression analysis techniques. The data used in this study are secondary data sourced from several agencies such as the Directorate General of Fiscal Balance (DJPk) and the Central Statistics Agency (BPS) for the period 2003 - 2022. The results show that simultaneously subsidy expenditure (energy and non-energy), grant expenditure, and social assistance expenditure have an influence on poverty in Indonesia, while partially energy subsidy expenditure and grant expenditure have an influence on poverty in Indonesia. However, non-energy subsidy expenditure and social assistance expenditure have no influence on poverty in Indonesia. This can occur because budget realization for grant expenditure and energy subsidy expenditure is prioritized in public policy to reduce poverty, while non-energy subsidy expenditure and social assistance expenditure occur due to inaccurate targeting in their distribution.

Keywords : *Energy Subsidy Expenditure, Non-Energy Subsidy Expenditure, Grant Expenditure, Social Assistance Expenditure, Number of Poor Population*

Acknowledge by,
Head Of Development Economics Program



Dr. Mukhlis, S.E., M.Si
NIP. 197304062010121001

Chairman



Feny Marissa, S.E., M.Si
NIP.199004072018032001

DAFTAR RIWAYAT HIDUP		
	Nama	Dinar Islami Sari
	NIM	01021281924034
	Tempat, Tanggal Lahir	Bekasi, 8 Februari 2001
	Alamat	Jln. H. Durrahman, RT03/04, No. 15, Ds. Bojongkulur, Kec. Gunung Putri, Kab. Bogor
	Nomor Handphone	082125429391
Agama	Islam	
Jenis Kelamin	Perempuan	
Status	Belum Menikah	
Kewarganegaraan	Indonesia	
Tinggi Badan	162 cm	
Berat Badan	47 kg	
Email	dinarislami.sari20@gmail.com	
RIWAYAT PENDIDIKAN		
2007 – 2013	SDN Bojongkulur 4	
2013 – 2016	SMPN 3 Gunung Putri	
2016 – 2019	SMAN 2 Gunung Putri	
2019 – 2023	S1 Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Sriwijaya	
PENGALAMAN ORGANISASI		
2020 – 2021	Anggota Medinfo KEIMI FE UNSRI	
2021 – 2022	Sekretaris Medinfo EIT FE UNSRI	
2022 – 2023	Staff Ahli Medinfo KSPM FE UNSRI	
2022 – 2023	Anggota Kewirausahaan GenBI Sumsel	
BEASISWA		
2022 – 2023	Beasiswa Bank Indonesia	

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF	i
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
SURAT PERNYATAAN INTEGRASI KARYA ILMIAH.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
UCAPAN TERIMAKASIH.....	v
ABSTRAK	vii
ABSTRACT.....	viii
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	10
1.3. Tujuan Penelitian.....	10
1.4. Manfaat Penelitian.....	10
1.4.1 Manfaat Praktis	10
1.4.2 Manfaat Teoritis.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1 Landasan Teori dan Konseptual	11
2.1.1 Teori Kemiskinan Ragnar Nurkse	11
2.1.2 Teori Pengeluaran Pemerintah.....	12
2.1.2.1 Model Pembangunan Tentang Perkembangan Pengeluaran Pemerintah.....	13
2.1.2.2 Teori Adolf Wagner	14
2.1.2.3 Teori Peacock dan Wiseman.....	15
2.1.3 Expenditure Programs for the Poor (Program Pengeluaran untuk Kemiskinan).....	16
2.1.3.1 TANF	17
2.1.3.2 MEDICAID.....	20

2.1.3.3 Asuransi Pengangguran.....	20
2.1.3.4 Kupon Makanan dan Nutrisi Anak	21
2.1.3.5 Bantuan Perumahan	21
2.1.3.6 Program untuk Meningkatkan Pendapatan	22
2.1.4 Social Security (Jaminan Sosial)	23
2.1.5 Kemiskinan	24
2.1.6 Belanja Subsidi	28
2.1.7 Belanja Hibah	29
2.1.8 Belanja Bantuan Sosial	32
2.2 Penelitian Terdahulu.....	35
2.3 Kerangka Pemikiran	38
2.4 Hipotesis	40
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	41
3.1 Ruang Lingkup Penelitian	41
3.2 Jenis dan Sumber Data	41
3.3 Teknik Analisis.....	42
3.3.1 Uji Kelayakan Model.....	43
3.3.1.1 Uji Hipotesis	43
1). Uji t (Uji Parsial).....	43
2). Uji F (Uji Simultan)	43
3.3.1.2 Koefisien Determinasi.....	44
3.3.2 Uji Asumsi Klasik.....	44
3.3.2.1 Uji Normalitas	45
3.3.2.2 Uji Autokorelasi	45
3.3.2.3 Uji Heteroskedastisitas.....	46
3.3.2.4 Uji Multikolinieritas	46
3.4 Definisi Operasional Variabel	47
3.4.1 Belanja Subsidi	47
3.4.2 Belanja Hibah	48
3.4.3 Belanja Bantuan Sosial	48
3.4.4 Kemiskinan	48
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	49

4.1 Hasil Penelitian.....	49
4.1.1 Perkembangan Kemiskinan di Indonesia.....	49
4.1.2 Perkembangan Belanja Subsidi di Indonesia.....	51
4.1.3 Perkembangan Belanja Hibah di Indonesia.....	52
4.1.4 Perkembangan Belanja Bantuan Sosial di Indonesia.....	54
4.2 Hasil Analisis Data.....	56
4.2.1 Hasil Estimasi Regresi Linier Berganda.....	56
4.2.2 Uji Kelayakan Model.....	57
4.2.2.1 Uji t (Uji Parsial).....	57
4.2.2.2 Uji F (Uji Simultan).....	59
4.2.2.3 Koefisien Determinasi (R^2).....	59
4.2.4 Hasil Uji Asumsi Klasik.....	60
4.2.4.1 Uji Normalitas.....	60
4.2.4.2 Uji Autokorelasi.....	61
4.2.4.3 Uji Heterokedastisitas.....	61
4.2.4.4 Uji Multikolinieritas.....	62
4.3 Pembahasan.....	63
4.3.1 Pengaruh Belanja Subsidi (energi dan non-energi) terhadap Kemiskinan di Indonesia.....	63
4.3.2 Pengaruh Belanja Hibah terhadap Kemiskinan di Indonesia.....	66
4.3.3 Pengaruh Belanja Bantuan Sosial terhadap Kemiskinan di Indonesia.....	67
4.4.4 Pengaruh Belanja Bantuan Subsidi (energi dan non-energi), Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial secara Simultan terhadap Kemiskinan di Indonesia.....	70
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	71
5.1 Kesimpulan.....	71
5.2 Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA.....	74
LAMPIRAN.....	79

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Ekspenditures on Major Need-Tested Programs (2004).....	17
Tabel 4. 1 Hasil Estimasi Regresi Linier Berganda	56
Tabel 4. 2 Hasil Uji t (Uji Parsial)	58
Tabel 4. 3 Hasil Uji F (Uji Simultan).....	59
Tabel 4. 4 Koefisien Determinasi (R ²)	59
Tabel 4. 5 Hasil Uji Autokorelasi	61
Tabel 4. 6 Hasil Uji Heterokedastisitas.....	61
Tabel 4. 7 Hasil Uji Multikolinieritas	62

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia tahun 2018 – 2022 (Juta Jiwa)	2
Gambar 1. 2 Belanja Subsidi (Energi dan Non-Energi), Belanja Hibah dan Bantuan Sosial menurut Jenis Pengeluaran di Indonesia Periode 2018 – 2022 di Indonesia (Triliun Rupiah)	7
Gambar 2. 1 Lingkaran Setan Versi Nurkshe	11
Gambar 2. 2 Pertumbuhan Pengeluaran Pemerintah Menurut Wagner	15
Gambar 2. 3 Kurva Perkembangan Pengeluaran Pemerintah	16
Gambar 2. 4 Budget Constraint for Leisure-Income Choice	18
Gambar 2. 5 Budget Constraint Under TANF	19
Gambar 2. 6 Labor Supply Decision Under TANF	19
Gambar 2. 7 Budget Constraint for Present and Future Consumption	24
Gambar 2. 8 Kerangka Pemikiran	39
Gambar 4. 1 Pergerakan Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia 2003 – 2022 (Juta Jiwa)	49
Gambar 4. 2 Pergerakan Belanja Subsidi (energi dan non-energi) di Indonesia 2003 – 2022 (Triliun Rupiah)	51
Gambar 4. 3 Pergerakan Belanja Hibah di Indonesia 2003 – 2022 (Triliun Rupiah)	53
Gambar 4. 4 Pergerakan Belanja Bantuan Sosial di Indonesia 2003 – 2022 (Triliun Rupiah)	54
Gambar 4. 5 Hasil Uji Normalitas	60

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Data Regresi Time Series Kemiskinan, Belanja Subsidi (Energi dan Non-Energi), Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial di Indonesia Tahun 2003 - 2022	79
Lampiran 2 Uji Normalitas	79
Lampiran 3 Uji Autokorelasi	80
Lampiran 4 Uji Heterokedastisitas.....	80
Lampiran 5 Uji Multikolinieritas	81
Lampiran 6 Uji Regresi Berganda.....	81

BAB I

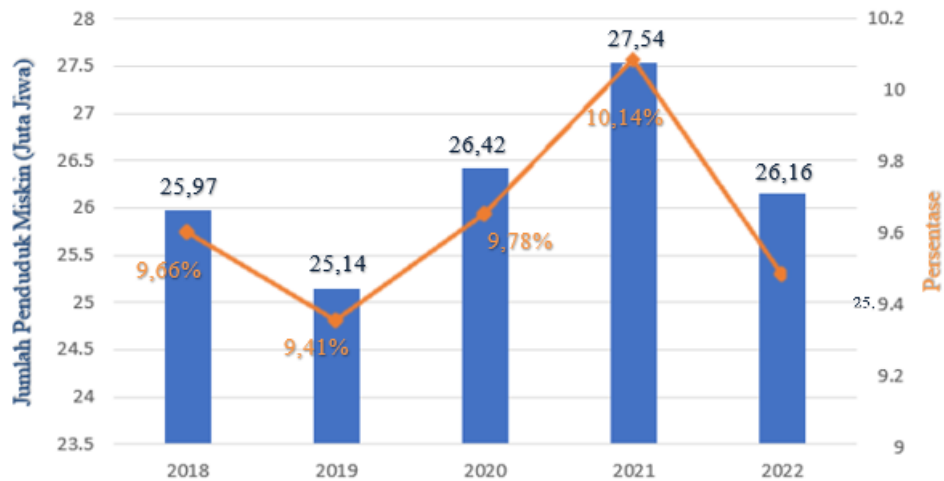
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara berkembang dan kemiskinan masih menjadi masalah. Pratama (2014) mengatakan bahwa Indonesia, negara berkembang yang berusia 57 tahun, memiliki tingkat kemiskinan 24 persen dengan garis kemiskinan kurang dari \$1 per 240 juta penduduk. Kemiskinan merupakan masalah yang cukup rumit di negara berkembang. Namun, beberapa negara berkembang telah berupaya meningkatkan produksi dan produktivitasnya (Djamaluddin et al., 2016). Situasi kemiskinan suatu negara atau wilayah juga mencerminkan kesejahteraan masyarakatnya (Edward, 2013). Di Indonesia jumlah penduduk miskin masih tergolong banyak, apalagi setelah negara Indonesia mengalami pandemi *Covid-19* penduduk miskin terus bertambah. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan Indonesia naik menjadi 10,19% pada September 2020. Bila dibandingkan pada tahun 2019, jumlah penduduk miskin di Indonesia meningkat menjadi 2,76 juta jiwa. Ini lantaran pandemi telah menyebabkan penurunan aktivitas ekonomi secara normal serta pendapatan masyarakat.

Menurut Khomsan et al. (2015), kemiskinan terbagi menjadi beberapa jenis, pertama kemiskinan absolut dimana individu yang penghasilannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan primernya. Kedua, kemiskinan relatif ialah diakibatkan oleh hasil kebijakan pembangunan yang tidak terdistribusi secara merata kepada masyarakat. Ketiga, kemiskinan kultural, yaitu kemiskinan yang

diakibatkan oleh tingkah laku atau nilai, pemikiran dan cara bekerja. Terakhir kemiskinan struktural keadaan yang diakibatkan suatu individu atau kelompok dalam warga.



Gambar 1. 1 Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia tahun 2018 – 2022 (Juta Jiwa)

Sumber : Data diolah, Badan Pusat Statistik (BPS)

Pada Gambar 1.1 menunjukkan perkembangan jumlah dan persentase jumlah penduduk miskin di Indonesia yang berfluktuasi selama periode 2018 – 2022. Pada tahun 2018 jumlah penduduk miskin sebesar 25,67 juta jiwa (9,66 persen) dan menurun pada tahun 2019. Tahun 2019 merupakan tahun yang memiliki jumlah penduduk miskin paling sedikit, yakni sebesar 24,79 juta jiwa (9,22 persen), hal ini dapat disebabkan turunnya tingkat pengangguran dan inflasi relatif rendah. Kemudian mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada tahun 2020 dan 2021 hingga 27,54 juta jiwa (10,14 persen). Larasati Prayoga et al. (2021) berpendapat bahwa terjadinya kenaikan jumlah penduduk miskin ini dapat disebabkan karena kualitas kesehatan yang buruk, upah minimum yang tidak memadai, taraf hidup masyarakat yang buruk serta

meningkatnya angka pengangguran setiap tahun tanpa adanya tambahan kesempatan kerja. Selanjutnya 2022 perkembangan jumlah penduduk miskin mengalami penurunan. Hal ini tidak terlepas dari upaya pemerintah dalam mengatasi kemiskinan.

Melati et al. (2021) mengemukakan bahwa salah satu tujuan pembangunan nasional adalah untuk menurunkan tingkat kemiskinan. Yacoub (2012) menjelaskan dalam penelitiannya bahwa kemiskinan berhubungan dengan keberhasilan dasar dalam hidup karena, kemiskinan merupakan masalah yang dihadapi oleh hampir semua negara. Kemiskinan terjadi karena hasil dari pendapatan yang tidak dapat mencukupi kebutuhan dasar masyarakat. Pendapatan merupakan faktor yang menentukan kesejahteraan masyarakat. Meski buktinya belum konklusif, banyak ahli mengklaim bahwa salah satu alat penting untuk menurunkan ketimpangan pendapatan dan tingkat kemiskinan adalah melalui pengeluaran pemerintah (Anderson et al., 2018).

Menurut Rosen & Gayer (2010) dalam pengeluaran pemerintah untuk kemiskinan, pemerintah harus cermat dalam melakukan peningkatan dan menentukan urutan pengeluaran kemiskinan yaitu dimulai dari perawatan medis, bantuan tunai, bantuan makanan pokok, bantuan tempat tinggal, bantuan pekerjaan dan pelatihan, bantuan pendidikan dan bantuan kebutuhan energi. Menurut Mankiw et al. (2012) kemiskinan adalah salah satu masalah yang sangat sulit dihadapi oleh pembuat kebijakan. Ramadhan & Mariyanti (2014) mengkaji kondisi ekonomi Indonesia saat periode 1997 – 1998 serta diiringi krisis kepemimpinan, karena pemerintahan sudah beberapa kali

menghadapi siklus untuk mengubah presiden. Hal itu mengakibatkan suatu kebijakan yang dianggarkan serta dilakukan pemerintah guna mengatasi masalah – masalah kemiskinan serta yang paling utama dalam memperbaiki perekonomian yang ada di Indonesia. Pemerintah memberlakukan Salah satu cara untuk meningkatkan kesejahteraan warga adalah pemberian subsidi Subsidi dimaksudkan untuk membantu warga, terutama masyarakat miskin dalam mencukupi kebutuhan pokok dan meningkatkan kesejahteraan taraf hidup warga miskin.

Menurut Stephen Soen et al. (2022) subsidi di definisikan sebagai uang yang dibayarkan oleh pemerintah kepada perusahaan atau rumah tangga untuk mencapai tujuan tertentu. Kristinawati et al (2020) berpendapat bahwa belanja subsidi memiliki pengaruh negatif terhadap kemiskinan, dimana jika belanja subsidi pemerintah naik maka akan menurunkan angka kemiskinan. Di Indonesia untuk meringankan beban masyarakat miskin, subsidi terbagi 2 bagian, yakni subsidi energi berupa listrik, bahan bakar minyak (BBM) dan LPG sedangkan subsidi non-energi berupa subsidi pangan, yang disalurkan dalam bentuk beras yang disebut beras miskin, subsidi benih dan subsidi pupuk (Khairi & Aidar, 2018). Putra (2018) mengatakan kebijakan khusus yang telah dirumuskan pemerintah pusat untuk menangani keperluan pangan seperti listrik, beras, bbm, mengatur penyediaan bbm kepada warga tidak mampu. Subsidi lainnya juga dapat berupa pendidikan dan pelayanan Kesehatan gratis bagi masyarakat miskin Dengan meningkatkan subsidi di sektor-sektor tersebut, masyarakat berpenghasilan rendah dapat memperoleh lebih banyak

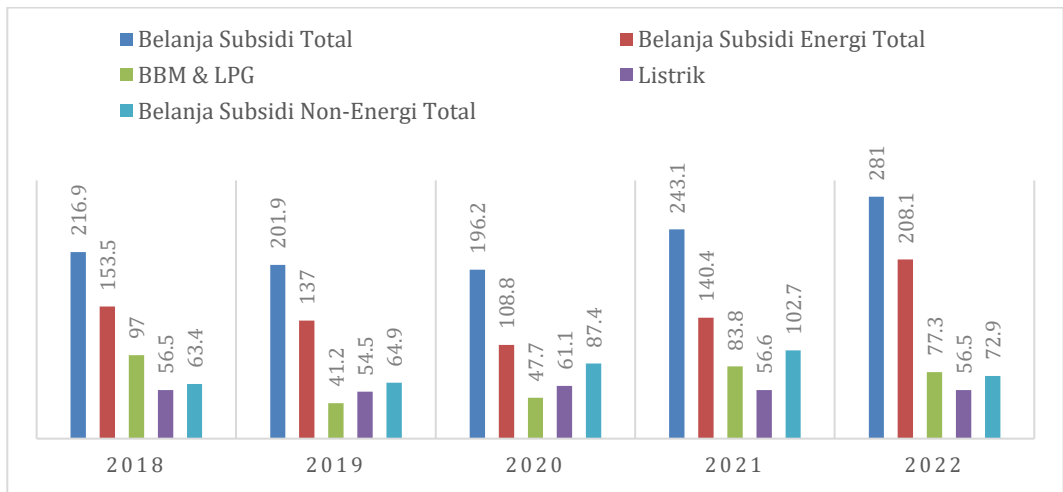
akses ke air bersih dan listrik. Akibatnya, dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat miskin (Wokadala & Magidu, 2010).

Pemberian dana hibah juga merupakan program dari pengeluaran pemerintah yang dapat mengatasi kemiskinan selain belanja subsidi. Berlandaskan Pasal 27 ayat (7) huruf f PP Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, hibah adalah penyediaan uang/barang atau jasa kepada pemerintah atau otoritas lokal lainnya, perusahaan daerah, komunitas, dan kelompok sosial, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat serta bergulir. Pemberian bantuan hibah oleh pemerintah daerah tersebut diperbolehkan berdasarkan Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

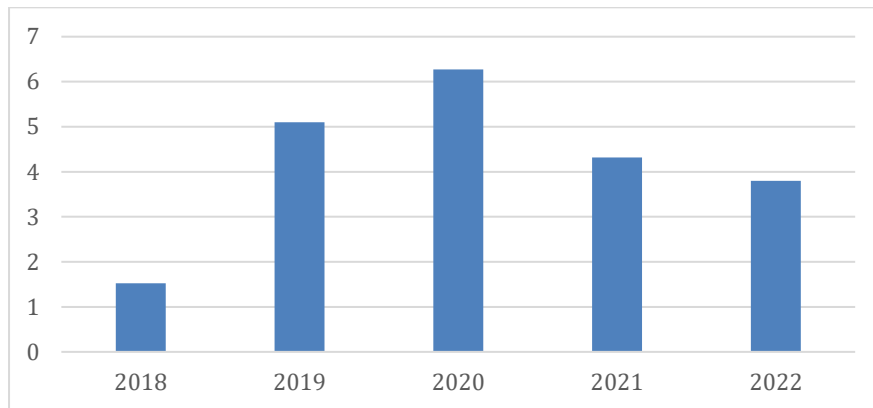
Menurut Ekwarso et al. (2011) belanja hibah menyediakan biaya dukungan modal usaha untuk mendukung kelompok masyarakat dan individu yang memiliki usaha dan berpenghasilan rendah. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa belanja hibah memiliki pengaruh negatif terhadap kemiskinan, melalui program pemerintah dengan bantuan modal usaha dan pemberdayaan masyarakat. Hal tersebut dilaksanakan agar meningkatkan perkembangan perekonomian masyarakat, terutama masyarakat miskin. Kehadiran hibah sebagai bantuan modal usaha untuk masyarakat miskin, tampak jelas dengan kegiatan sosial masyarakat seperti memanfaatkan lahan kosong, penggunaan teknologi baru dalam operasi dan peningkatan aset ekonomi seperti kendaraan serta rumah. Efek nyata dari penyaluran bantuan

hibah kepada organisasi masyarakat dan individu tercermin dalam semua diskusi yang berkaitan dengan partisipasi masyarakat, termasuk pekerja desa dan pengusaha desa.

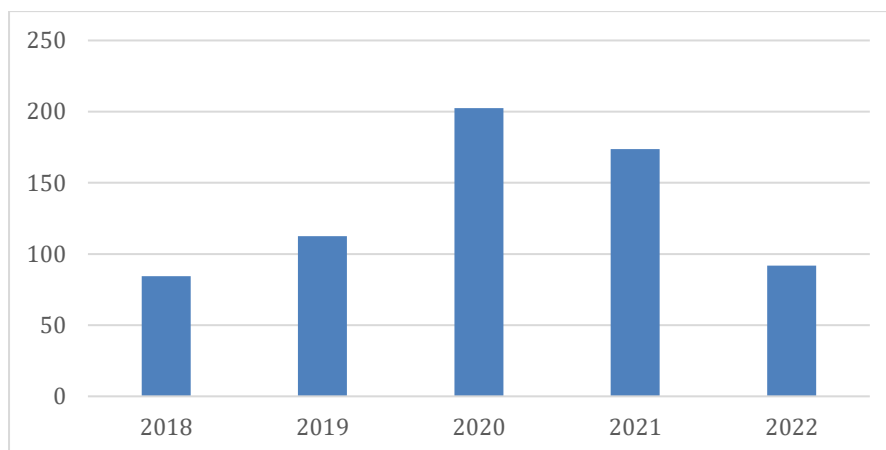
Belanja bantuan sosial (bansos) juga merupakan salah satu instrument pengeluaran pemerintah yang dapat mengentas kemiskinan di Indonesia. Bantuan sosial diberikan oleh pemerintah dalam bentuk barang, jasa dan uang untuk melindungi masyarakat tidak mampu dari potensi resiko sosial serta untuk meningkatkan taraf hidup mereka (Alamanda, 2020). Anggaran untuk perlindungan sosial ini termasuk pengeluaran untuk dukungan pendapatan konsumen, pengeluaran untuk dukungan pendapatan produktif, dan pengeluaran untuk dukungan pendapatan pendidikan. Bantuan sosial diartikan sebagai peristiwa atau kejadian yang dapat mengakibatkan potensi resiko sosial seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat akibat terjadinya krisis sosial, krisis politik, krisis ekonomi, bencana alam dan fenomena alam. Jika tidak diberikan maka masyarakat miskin akan semakin sengsara serta tidak bisa hidup dalam kondisi yang layak (Rivani, 2014). Saeed et al. (2020) berpendapat pemerintah di seluruh dunia sering memberikan bantuan tunai sosial kepada penduduknya untuk berbagai tujuan seperti perataan konsumsi, pengentasan kemiskinan, peningkatan penggunaan layanan pendidikan dan kesehatan, dll.



(a) Belanja Subsidi Energi dan Belanja Subsidi Non-Energi



(b) Belanja Hibah



(c) Belanja Bantuan Sosial

Gambar 1.2 Belanja Subsidi (Energi dan Non-Energi), Belanja Hibah dan Bantuan Sosial menurut Jenis Pengeluaran di Indonesia Periode 2018 – 2022 di Indonesia (Triliun Rupiah)

Sumber : Data diolah, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK)

Berdasarkan Gambar 1.2 realisasi pengeluaran pemerintah untuk belanja subsidi energi dan belanja subsidi non-energi yang diberikan pada penduduk miskin mengalami fluktuasi selama 2018 – 2022. Dengan peningkatan belanja subsidi energi tertinggi pada tahun 2022 sebesar 208.1 triliun, dan terendah pada tahun 2020 sebesar 108.8 triliun. Sedangkan belanja subsidi non-energi mengalami peningkatan tertinggi pada tahun 2021 sebesar 102.7 triliun dan terendah pada tahun 2018 yakni 63.4 triliun. Hal serupa terjadi pada belanja hibah dan belanja bantuan sosial yang mengalami fluktuasi. Belanja hibah mengalami fluktuasi tahun 2018 – 2019 terjadi penurunan pada tahun 2018 di belanja hibah sebesar 1.52 triliun. Kemudian tahun 2020 mengalami peningkatan yang cukup signifikan sebesar 6.27 triliun. Begitupun dengan belanja bantuan sosial pada tahun 2020 mencapai 202.53 triliun, ini terjadi karena berbagai pengentasan ekonomi bahkan phk, bantuan sosial telah diberikan ke masyarakat. Akan tetapi belanja bantuan sosial mengalami penurunan di setiap tahun berikutnya hingga 91.88 triliun. BPS menjelaskan rencana anggaran belanja bansos untuk penanggulangan kemiskinan setiap tahunnya naik berkisar 0 hingga 2 persen. Namun, pemanfaatan dana tersebut belum sepenuhnya tepat sasaran. Program bansos untuk penduduk miskin mencakup Bidikmisi, Program Keluarga Harapan (PKH), Bansos Rastra, dll. Menurut LKPP (2022) defisit belanja ini dapat terjadi karena belanja negara lebih tinggi dari pendapatan negara.

Secara teoritis, pengeluaran sosial yang meningkat seharusnya dapat menurunkan angka kemiskinan dalam jangka pendek ataupun jangka panjang. Akan tetapi dari data yang dijelaskan pada Gambar 1.1 dan Gambar 1.2, pada tahun 2018 – 2022 pengeluaran pemerintah mengalami peningkatan yang cukup signifikan, kecuali belanja hibah dan belanja bantuan sosial pada tahun 2021 -2022. Tetapi dengan peningkatan pengeluaran tersebut seharusnya jumlah penduduk miskin di Indonesia berkurang, namun sebaliknya jumlah penduduk miskin semakin bertambah. Ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan Dartanto (2013); Ogun (2010); Ekwarso et al. (2011) dimana hasil penelitiannya menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah berdampak signifikan terhadap pengurangan kemiskinan. Namun sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh N.Habibov & Fan (2006); Ospina (2010); Permadi (2018); serta Alamanda (2020) dimana hasil penelitiannya menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah tidak berdampak signifikan terhadap pengurangan kemiskinan, yang berarti hal ini bertentangan dan tidak sesuai dengan teori kemiskinan.

Berdasarkan fenomena dan uraian sebelumnya maka bahasan mengenai kemiskinan dalam kaitannya dengan belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bansos penting untuk dilakukan, agar dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk menambah informasi dan wawasan bagi penelitiannya di masa depan. Maka akan dilakukannya penelitian mengenai “Pengaruh Belanja Subsidi, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial terhadap Kemiskinan di Indonesia Periode 2003 – 2022.”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yakni : Bagaimana pengaruh belanja subsidi (energi dan non-energi), belanja hibah dan belanja bantuan sosial secara parsial dan simultan terhadap kemiskinan di Indonesia tahun 2003 – 2022 ?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh belanja subsidi (energi dan non-energi), belanja hibah dan belanja bantuan sosial secara parsial dan simultan terhadap kemiskinan di Indonesia tahun 2003 – 2022.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian ini antara lain:

1.4.1 Manfaat Praktis

Dengan mengkaji pengaruh belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial terhadap kemiskinan di Indonesia diharapkan dapat diperoleh suatu kebijakan yang secara nyata efektif dan mencapai sasaran yang dikehendaki dan diharapkan dampak negatif dari suatu kebijakan dapat dikendalikan.

1.4.2 Manfaat Teoritis

Memberikan referensi / solusi dalam bidang ekonomi keuangan daerah, khususnya mengenai belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial dan kaitannya dengan kemiskinan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afonso, A., Schuknecht, L., & Tanzi, V. (2008). Income Distribution Determinants and Public Spending Efficiency. *European Central Bank*, 861, 1–55. <https://doi.org/10.1007/s10888-010-9138-z>
- Agustin, L., & Sumarsono, H. (2022). Pengaruh Pengangguran, IPM, Dan Bantuan Sosial Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Jawa Timur. *Ekonika : Jurnal Ekonomi*, 7(2), 262–286. <https://doi.org/10.30737/ekonika.V7i2.2221>
- Alamanda. (2020). The Effect of Government Expenditure on Income Inequality and Poverty in Indonesia. *JIA (Info Artha)*, 4(1), 1–11. <https://doi.org/10.31092/jia.v4i1.614>
- Anderson, E., D'Orey, M. A. J., & Esposito, L. (2018). Does Government Spending Affect Income Poverty? A Meta-regression Analysis. *World Development*, 103, 60–71. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2017.10.006>
- Andi Permadi, Y. (2018). Growth, Inequality, and Poverty: An Analysis of Pro-Poor Growth in Indonesia. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, 11(2), 216–233. <https://doi.org/10.2483/JEKT.2018.v11.i02.p08>
- Arfandi, R. Z., & Sumiyarti. (2022). Dampak Program Bantuan Sosial terhadap Pengetasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan di Indonesia. *Media Ekonomi*, 30(1), 1–15. <https://doi.org/10.25105/me.v30i1.10304>
- Badan Pusat Statistik. (2021). *Persentase Penduduk Miskin September 2020 naik menjadi 10,19 persen*. Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa) Menurut Provinsi dan Daerah 2021-2022*. Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Penduduk Miskin*. In *Badan Pusat Statistik*.
- Barrientos, A. (2019). The Role of Social Assistance Reducing Poverty and Inequality in Asia and the Pacific. *ADB Sustainable Development Working Paper Series*, 62, 1–30. <https://doi.org/10.22617/WPS190423-2>
- Buletin Teknis Nomor 10 Standar Akuntansi Pemerintahan tentang Akuntansi Belanja Bantuan Sosial*. (2011). Komite Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Christian, G., Cahyat, A., Haug, M., & Godwin, L. (2007). *Menuju Kesejahteraan: Pemantauan Kemiskinan di Kutai Barat, Indonesia*. Center for International Forestry Research (CIFOR). <https://doi.org/10.17528/cifor/002345>
- Creswell, J. W. (2012). *Educational Research: Planning, Conducting, and Evaluating Quantitative and Qualitative Research* (4th ed.). Pearson.
- Dartanto, T. (2013). Reducing fuel subsidies and the implication on fiscal balance and poverty in Indonesia: A simulation analysis. *Energy Policy*, 58, 117–134. <https://doi.org/10.1016/j.enpol.2013.02.040>
- Deswanto, D. B., Ismail, A., & Hendarmin. (2017). Pengaruh Belanja Daerah Berdasarkan Klasifikasi Ekonomi terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan

- Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2010 - 2015. *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Kewirausahaan*, 6(3), 187–210. <https://doi.org/10.26418/jebik.v6i3.23256>
- Djamaluddin, S., Nizar Hidayanto, A., & Wardhani, S. (2016). Perception of beneficiaries towards adoption of e-money in the distribution of social assistance in Indonesia. *Economic Journal of Emerging Markets*, 8(1), 13–34. <https://doi.org/10.20885/ejem.vol8.iss1.art2>
- Edward, C. (2013). Faktor yang Memengaruhi Volume Impor Beras di Indonesia. *JIBEKA*, 7(2), 38–43.
- Ekwarso, H., Zulkarnaini, & Hamid Pane, R. (2011). Kinerja Belanja Hibah untuk Usaha Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan di Kota Pekanbaru. *Jurnal Sosial Ekonomi Pembangunan*, 2(4), 80.
- Emran, M. S., & Stiglitz, J. E. (2005). On Selective Indirect Tax Reform in Developing Countries. *Journal of Public Economics*, 89, 599–623. <https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2004.02.007>
- Gujarati, D. N. (2006). *Dasar-Dasar Ekonometrika Jilid 1* (3rd ed.). Erlangga.
- Handoko, R., & Patriadi, P. (2005). Evaluasi Kebijakan Subsidi Non BBM. *Kajian Ekonomi Dan Keuangan*, 9(4), 42–64.
- Iqbal, M. (2015). Regresi Data Panel (2) “ Tahap Analisis.” In <https://dosen.perbanas.id/regresi-data-panel-2-tahap-analisis> diakses 24 Februari 2016.
- Kemenkeu Subsidi Pemerintah*. (2015). Kementerian Keuangan.
- Khairi, M. W., & Aidar, N. (2018). Pengaruh Subsidi Energi terhadap Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM)*, 3(3), 359–369.
- Khomsan, A., H. Dharmawan, A., Saharuddin, Sukandar, D., & Syarief, H. (2015). *Indikator Kemiskinan dan Misklasifikasi Orang Miskin*. Yayasan Obor Indonesia.
- Kristinawati, A., Sarfiah, S., & Destiningsih, R. (2020). Analisis Pengaruh Pendidikan, Tingkat Pengangguran Terbuka dan Pengeluaran Subsidi terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia Tahun 1998 - 2018. *Dinamic : Directory Journal of Economic*, 2(4). <https://doi.org/10.31002/dinamic.v2i4.1440>
- Kuncoro, M. (2006). *Ekonomika Pembangunan : Teori, Masalah dan Kebijakan*. Unit Penerbit dan Percetakan STIM YKPN.
- Larasati Prayoga, M., Muchtolifah, M., & Sishadiyati, S. (2021). Faktor Kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo. *Jambura Economic Education Journal*, 3(2), 135–143. <https://doi.org/https://doi.org/10.24856/mem.v33i2.671>
- LKPP Laporan Keuangan Pemerintah Pusat*. (2003-2022). Badan Pemeriksa Keuangan.
- Mangkoesebroto, G. (2016). *Ekonomi Publik* (3rd ed.). BPFE-Yogyakarta.
- Mankiw, N. G., Quah, E., & Wilson, P. (2012). *Pengantar Ekonomi Makro : Edisi*

- Asia (Principles of Economics : An Asia Edition) Volume 2*. Salemba Empat.
- Melati, A. M., Sudrajat, & Burhany, D. I. (2021). Pengaruh Belanja Pendidikan, Belanja Kesehatan dan Belanja Bantuan Sosial terhadap Kemiskinan pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat. *Indonesia Accounting Research Journal*, 1(3), 422–430.
- Milasari, A. S. (2020). *Program Bantuan Sosial dan Akuntabilitasnya*. KPPN Ketapang.
- Misdawita, & Sari, A. A. P. S. (2013). Analisis Dampak Pengeluaran Pemerintah di Bidang Pendidikan, Kesehatan, dan Pengeluaran Subsidi terhadap Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Kebijakan Public*, 4(2). <https://doi.org/10.22212/jekp.v4i2.50>
- N.Habibov, N., & Fan, L. (2006). Social Assistance and the Challenges of Poverty and Inequality in Azerbaijan, a low-income country in transition. *Journal of Sociology & Social Welfare*, 33(1), 203–226.
- Nachrowi, N. D., & Usman, H. (2006). *Pendekatan Populer dan Praktis Ekonometrika untuk Analisis Ekonomi dan Keuangan*. Lembaga PLPFE UI.
- Nguyen, C., & Berg, M. Van den. (2009). The Impact of Public Transfers on Poverty and Inequality: Evidence from rural Vietnam. *Development Policy Review*, 29(6), 689–728.
- Ogun, T. P. (2010). Infrastructure and poverty reduction: Implications for urban development in Nigeria. *Wider Working Paper*, 21, 1–18. <https://doi.org/10.1007/s12132-010-9091-8>
- Ospina, M. (2010). The Effect of Social Spending on Income Inequality: An Analysis for Latin American Countries. *Center for Research in Economic & Finance (CIEF)*, 10–03, 1–28. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2427510>
- Penurunan Kemiskinan di Indonesia Melambat, Ketimpangan Meningkat: World Bank. (2014). In *The World Bank*.
- Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah*. (2011). JDIH BPK RI.
- Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 102/PMK.02/2018 tentang Klasifikasi Anggaran*. (2018). JDIH BPK RI.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 32 tahun 2011, pasal 1 ayat 15 tentang Klasifikasi bantuan sosial*. (2011). JDIH BPK RI.
- Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2019 Pasal 1 angka 1 tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial*. (2019). JDIH BPK RI.
- Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2019 Pasal 5 tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial*. (2019). JDIH BPK RI.

- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.* (2019). JDIH BPK RI.
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 tahun 2005 Pasal 27 ayat (7) huruf f tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.* (2005). JDIH BPK RI.
- Permendagri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.* (2018). JDIH BPK RI.
- PERPU No.45 tahun 2013.* (2013). JDIH BPK RI.
- Pratama, Y. C. (2014). Analisis Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan di Indonesia. *Esensi: Jurnal Bisnis Dan Manajemen*, 4(2), 210–223. <https://doi.org/10.15408/ess.v4i2.1966>
- Putra, D. R. (2018). Pengaruh Bantuan Raskin terhadap Kelangsungan Hidup Masyarakat Kurang Mampu Studi pada Status Sosial Ekonomi masyarakat Kelurahan Tanjung Agung Raya, Kecamatan Kedamian, Kota Bandar Lampung. *Universitas Lampung*, 1–120.
- Ramadhan, H., & Mariyanti, T. (2014). Pengaruh Pajak, Subsidi dan ZIS terhadap Penurunan Kemiskinan di Indonesia. *Media Ekonomi*, 22(2), 123–132. <https://doi.org/10.25105/me.v22i2.3170>
- Rarun, C. C. ., Kawung, G. M. ., & Niode, A. O. (2018). Analisis Pengaruh Belanja Bantuan Sosial dan Investasi Swasta terhadap Kemiskinan di Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 18(1), 91–102.
- Rivani, E. (2014). Kebijakan Subsidi BBM dan Efisiensi Perekonomian. *Info Singkat Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, VI(09/I/P3DI), 13–16.
- Robert K, T. (2015). *The Economics of Subsidies for Community Development A Primer*. <https://www.bostonfed.org/-/media/...subsidy/10-triest.pdf>
- Rosen, H. S., & Gayer, T. (2010). *Public Finance* (9th ed.). The McGraw-Hill.
- Saeed, Kahif, M., Hayat, & Azmat, M. (2020). The Impact of Social Cash Transfers on Poverty in Pakistan-A Case Study of Benazir Income Support Programme. *MPRA Paper*, 1–33.
- Sendouw, A., Rumat, V. A., & Rotinsulu, D. C. (2017). Pengaruh Belanja Modal, Belanja Sosial dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Tingkat Kemiskinan di Kota Manado. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 18(5), 1–15. <https://doi.org/10.35794/jpekd.15780.19.2.2017>
- Stephen Soen, A., Sugianto, H., Theodorus, R., & Anggraeni Mapusari, S. (2022). Subsidi di Indonesia. *Wacana Ekonomi*, 21(1), 84–92.
- Undang-undang (UU) No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.* (2004). JDIH BPK RI.
- Wahyuningsih, T. (2019). *Ekonomi Publik* (Monalisa (Ed.); 1st ed.). PT RajaGrafindo Persada.

- Widarjono, A. (2013). *Ekonometrika : Pengantar dan Aplikasinya*. In *Jakarta : Ekonosia*.
- Wokadala, J., & Magidu, N. (2010). Public Spending in the Water Sub-Sector in Uganda: Evidence from Benefit Incidence Analysis. *Research in Agricultural & Applied Economics*, 1–24. <https://doi.org/10.22004/AG.ECON.150476>
- Yacoub, Y. (2012). Pengaruh Tingkat Pengangguran terhadap Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat. *EKSOS*, 8(3), 176–185.